

## ABSTRAK

**Muh. Fahmi Samsu, Andi Luhur Prianto, dan Riskasari 2024, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa.**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dengan pendekatan aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara terperinci. Tipe penelitian digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dengan informan yang dianggap mengetahui dan kompeten di bidangnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori dan merse menunjukkan (a) Berdasarkan pendekatan informasi, pelaksana program Ptsl di kantor Atr/Bpn Kabupaten Gowa telah bekerja dengan baik terkait pemberian informasi/penyuluhan terhadap masyarakat mengenai program Ptsl ini bekerjasama dengan aparat desa setempat. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai (b) isi kebijakan, Program PTSL merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Kabupaten Gowa di tahun 2024 mendapatkan jatah 33.000 bidang tanah untuk 3 kecamatan, selanjutnya program akan terus dilaksanakan sampai semua tanah di kabupaten Gowa bersrtifikat. Tentunya itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat (c). masyarakat sangat mendukung kegiatan ptsl ini, namun masyarakat mengharapkan pembayaran sesuai dengan aturan, kemudian adanya penambahan jatah bidang tanah untuk PTSL selanjutnya (d) Kerjasama yang baik antara Kementerian Atr/Bpn, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.**